

BAB III

OBJEK PENELITIAN

Sejarah Kelurahan Purwawinangun

Purwawinangun berarti awal dibangun. Sebelum kedatangan Islam, Masyarakat Kuningan menganut agama Hindu dan merupakan Daerah otonom yang masuk wilayah kerajaan Sunda yang dikenal dengan nama Pajajaran, seluruh Jawa barat termasuk Cirebon pada tahun 1389 M masuk bagian dari Pajajaran dengan pelabuhannya saat itu meliputi Cirebon, Indramayu, Karawang, Sunda Kelapa dan Banten. Waktu Cirebon dibawah pimpinan Ki Gedeng Jumajanjati anaknya Ki Gedeng Kasmaya, datanglah pelaut Cina yang dipimpin oleh Laksamana Te Ho (Cheng Ho) dan sebagai rasa terimakasihnya atas sambutan rakyat Cirebon, maka dibuatlah Mercusuar di Pelabuhan Cirebon itu. Setelah itu Pelabuhan Cirebon kedatangan seorang ulama Islam yang bernama Syekh Idhofi (Syekh Datuk Kahfi) yang dikenal dengan julukan Syeh Nuruljati. Ulama ini kemudian mendirikan pesantren dikaki bukit Sembung dan menetap di Pesambangan (Desa Jatimerta).

Salah satu murid ulama ini ada yang bernama Pangeran Walangsungsang Cakrabuana dan mendirikan sebuah kota bernama Caruban yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon. Setelah ia berhaji mendapat julukan Haji Duliman yang akhirnya memimpin pemerintahan di Cirebon. Saat itu di pelabuhan Karawang datang juga seorang ulama yang bernama Syekh Hasanuddin dari Campa dan dikenal dengan sebutan Syekh Quro karena mendirikan pesantren Quro. Dikemudian hari pesantren ini kedatangan Syekh Maulana Akbar yang meneruskan perjalanannya ke Pesambangan. Dalam perjalanannya mengembangkan Islam, Syekh Maulana Akbar

ini pernah singgah sebentar di daerah Buni Haji – Luragung , kemudian melanjutkannya sampai ke daerah Kuningan yang pada waktu itu dikenal dengan nama Kejene (artinya Kuning) , penduduknya menganut agama Hindu (Agama Sanghiang), dengan pusat pemerintahannya di daerah Sidapurna yang artinya sempurna. Syech Maulana Akbar akhirnya menetap disana dan mendirikan pesantren di Sidapurna serta menikah dengan seorang putri pejabat pemerintahan Kejene dan mempunyai seorang putra bernama Syekh Maulana Arifin atau syekh Arif. Karena pesatnya kemajuan pesantren ini sehingga tidak cukup menampung para pendatang, maka dibuatlah pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun (Artinya mula-mula dibangun). Syekh Maulana Akbar ini meninggal dan dimakamkan di Astana Gede. Syekh Arif ini meneruskan usaha yang telah dirintis oleh ayahnya dengan memajukan bidang peternakan, terutama peternakan kuda yang khas di Kejene (kuda Kejene yang kemudian terkenal dengan sebutan Kuda Kuningan).

Gambaran Umum Kelurahan Purwawinangun

1. Pemerintahan

Purwawinangun adalah salah satu kelurahan di kecamatan Kuningan, jadi wilayah ini dikepalai oleh seorang lurah. Sebagai aparatur negara lurah dibantu oleh kepala dusun, aparatur kelurahan dan hansip. Satu dusun atau kampung biasanya merupakan satu RW (Rukun Warga) yang membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). RW dipimpin oleh Ketua RW dan RT dipimpin oleh Ketua RT.

2. Profil Daerah

Kelurahan Purwawinangun secara administrasi merupakan salah satu Kelurahan dalam

wilayah Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cijoho,

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kuningan,
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Winduherang,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kuningan,

Luas wilayah seluruhnya adalah 235,7 Hektar dan berada pada ketinggian ---- Mdpl dengan iklim tropis dan secara administrative terdiri dari 52 RT dan 16 RW yang dibagi menjadi 5 Lingkungan, yaitu:

- 1) Lingkungan Wage terdiri dari 14 RT dan 4 RW
- 2) Lingkungan Kliwon terdiri dari 9 RT dan 3 RW
- 3) Lingkungan Manis terdiri dari 11 RT dan 3 RW
- 4) Lingkungan Pahing terdiri dari 9 RT dan 3 RW
- 5) Lingkungan Puhun terdiri dari 9 Rt dan 3 RW

3. Ekonomi

Orang-orang Kelurahan Purwawinangun mempunyai berbagai profesi dari mulai PNS, Pedagang, Wiraswasta dan sebagainya

4. Pertanian

Kelurahan Purwawinangun tinggal sedikit lahan pertaniannya. Seperti daerah lainnya di Kuningan kebanyakan pertanian yang berkembang adalah tanaman padi dan palawija.

5. Perkebunan

Hasil perkebunan yang biasanya dibudidayakan kebanyakan dari jenis buah-buahan seperti: pisang, mangga dan rambutan.

6. Demografi

Penduduk kelurahan Purwawinangun berjumlah 13.393 orang, terdiri dari:

- 6.690 orang laki-laki

- 6.703 orang perempuan

94% beragama Islam dan ada juga yang beragama Kristen dan Budha. Perdagangan mendominasi pekerjaan penduduk Purwawinangun sekitar 50%, lainnya bekerja sebagai petani, PNS , TNI, Polisi, Karyawan, wiraswasta dan sebagainya.

7. Pendidikan

Di Kelurahan Purwawinangun terdapat sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Kampus Universitas yaitu:

- ❖ SDN Purwawinangun I (terletak di Jl. Siliwangi No. 45)
- ❖ SDN Purwawinangun II (terletak di Jl. Pramuka No. 15)
- ❖ SDN Purwawinangun III (terletak di Jl. Wijaya No. 55)
- ❖ SDN Purwawinangun IV (terletak di Jl. Pramuka No. 98)
- ❖ SDN Purwawinangun V (terletak di Jl. Ramajaksa No. 371)
- ❖ SDN Purwawinangun VI (terletak di Jl. Siaga Indah No. 16)
- ❖ SDN Purwawinangun VII (terletak di Jl. Purwawinangun No. 89)
- ❖ SDN Purwawinangun VIII (terletak di Jl.Syekh Maulana Akbar)
- ❖ SMPN 3 Kuningan (Jl. Pramuka)
- ❖ Kampus 2 Univeristas Kuningan (Jl. Pramuka)

7. Akses Transportasi

Karena terletak di pusat kota Kuningan maka akses transportasi tidak terlalu sulit, hampir semua angkot melewati daerah ini seperti: angkot 01, angkot 02, angkot 03, angkot 04, angkot 06, angkot 09 dan angkot 10.

Organisasi lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Purwawinangun antara lain :

1. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa.

Fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya. 10 program pokok PKK :

- ☐ Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- ☐ Gotong Royong
- ☐ Pangan
- ☐ Sandang
- ☐ Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
- ☐ Pendidikan dan Keterampilan
- ☐ Kesehatan
- ☐ Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- ☐ Kelestarian Lingkungan Hidup
- ☐ Perencanaan Sehat

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju

dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

3. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM

Dewan Kemakmuran Masjid (selanjutnya disingkat DKM) merupakan organisasi strategis dalam ikhtiar ibadah melalui peran aktif mengelola rumah Allah SWT. Organisasi ini mengutamakan persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah) antarwarga muslim yang bersifat terbuka, persamaan (egaliter), tidak memihak (non partisan) dan independen. Berkontribusi secara positif dan proaktif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. Karang Taruna

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (“Permensos 77/2010”), Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”), Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

5. Kelompok Tani

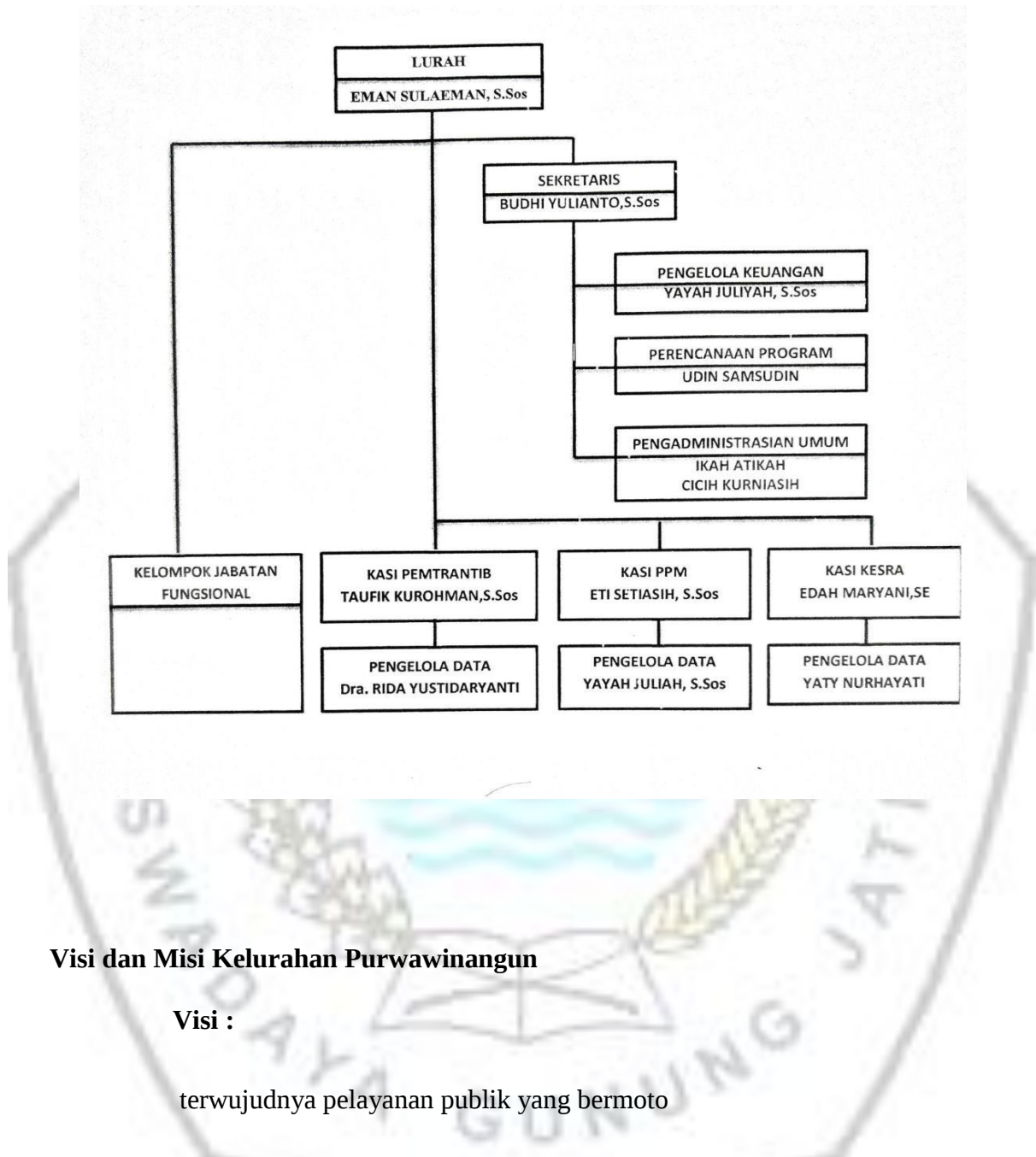
Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antarpetani.

Fungsi kelompok tani adalah menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada, sebagai media atau alat pembangunan dan membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok.

Kelurahan Purwawinangun memiliki fasilitas ibadah yang baik. Bangunan mesjid yang baik dan layak, organisasi DKM yang berjalan baik dengan diadakannya beberapa kegiatan keagamaan seperti pengajian, tablig akbar, dan memperingati hari-hari keagamaan lainnya.

Perekonomian di Kelurahan Purwawinangun tergolong ke dalam Kelurahan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Karena Masyarakat Kelurahan Purwawinangun meskipun termasuk kedalam wilayah Kota, akan tetapi masih memiliki jiwa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui kondisi fisik Kelurahan yang bersih dan indah. Selain itu setiap diadakannya suatu kegiatan desa seperti hari jadi Kuningan, HUT Republik Indonesia, Maulid Nabi, Tablig Akbar, perlombaan, dan lain-lain semua masyarakat berbondongbondong membantu dan memeriahkan acara.

STRUKTUR ORGANISASI



Visi dan Misi Kelurahan Purwawinangun

Visi :

terwujudnya pelayanan publik yang bermoto

" TOP "

(transparan - obyektif - profesional)

Menuju terciptanya pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat.

Misi :

1. Mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat yang " transparan "
2. Mewujudkan pelayanan administrasi secara " obyektif " yang berpedoman pada sumber informasi yang aktual dan akuntabel
3. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara " profesional " sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis).

